

**Dorongan Kuat FAKTA dan YLKI Terhadap Eksekutif dan Legislatif Pemprov DKI Jakarta Demi Perda Kawasan Tanpa Rokok**

---

Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia bersama dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) berkunjung ke Balai Kota DKI Jakarta untuk mendorong legislatif dan eksekutif untuk segera mengundangkannya Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Raperda KTR) DKI Jakarta.

Seperti kita ketahui Raperda KTR DKI Jakarta sudah menjadi isu 10 Tahun belakangan ini untuk segera diundangkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta namun selalu mengalami banyak kendala dalam prosesnya.

Sebagai contoh, pada 2016 lalu saat Raperda ini akan di ketok menjadi sebuah Perda terdapat "Tsunami Politik" yang terjadi di DPRD DKI Jakarta. Kala itu beberapa Anggota Dewan banyak yang diisukan terjerat kasus reklamasi pantai utara Jakarta.

Hari ini, FAKTA dan YLKI kembali berkunjung ke Balai Kota DKI Jakarta untuk mengupayakan diundangkannya Perda KTR DKI Jakarta sebelum masa jabatan Gubernur Anies Baswedan yang akan berakhir Oktober 2022 ini dan dilanjutkan dengan Gubernur Pelaksana Tugas (PLT).

Selain mendorong segera diundangkannya Raperda KTR Jakarta, FAKTA dan YLKI juga memberikan beberapa masukan terhadap "draf" rancangan Peraturan Daerah DKI Jakarta, salah satunya mengenai pengutamaan sanksi adminkstratif dalam penegakan Perda KTR DKi Jakarta nantinya.

Masukan tersebut didasari beberapa alasan, diantaranya penegakan yang akan lebih cepat dari pada proses tipping (tindak pidana ringan) yang selama ini memerlukan perangkat pengadilan seperti : Hakim, Jaksa dan Panitera dalam sebuah penegakan.

Mendorong sanksi administratif dianggap akan lebih efisien, hal itu sejalan dengan bagaimana Pemprov DKI menegakan pelanggaran - pelanggaran pada saat Jakarta ramai - ramaj menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) ditengah penyebaran Covid 19.

Draf masukan terhadap Raperda KTR DKI Jakarta sudah diterima oleh beberapa pihak saat kunjungan FAKTA dan YLKI ke Balai Kota DKI Jakarta, salah satunya Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta. Selain itu FAKTA dan YLKI juga telah membawa masukannya terhadap "draf" Raperda KTR DKI Jakarta ke beberapa Fraksi DPRD DKI Jakarta diantaranya : PKS (Partai Keadilan Sosial) dan PSI (Partai Solidaritas Indonesia).

Dengan kegiatan hari ini, FAKTA dan YLKI berharap ada semangat kembali untuk Eksekutif dan Legislatif Pemprov DKI Jakarta untuk mengundangkan Perda KTR DKI Jakarta di tahun ini, selain itu dengan masukan terhadap "draf" yang sudah ada, FAKTA dan YLKI berharap Perda KTR nantinya bisa mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat dalam pengawasan dan penegakan sebuah Perda.